

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN TANAH DATAR

Vivi Hendrita¹

email: vivihendrita@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tanah Datar ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar serta menganalisis kebijakan dan upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dianalisa secara *interpretative* menggunakan teori-teori ataupun literatur-literatur yang sesuai kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi lapangan dan studi literatur. Dari hasil penelitian didapat bahwa kondisi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar belum dilakukan secara optimal. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mengembangkan pariwisata terlihat dari berbagai kebijakan yang dibuat yang tercantum dalam renstra, dan RPJMD, serta didukung beberapa peraturan daerah dan peraturan Bupati Tanah Datar, namun dalam kebijakan ini masih terfokus pada pelaksanaan *event* dan promosi budaya dan belum menyentuh pengembangan terhadap objek wisata secara khusus sehingga dalam pelaksanaannya masih belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Datar.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pariwisata, dan Kabupaten Tanah Datar*

¹ Staff Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Sijunjung Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan, baik secara fisik maupun non fisik dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang No.32 dan 33 Tahun 2004, yang intinya berfokus kepada peralihan sistem pembangunan terdesentralisasi, dimana setiap daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Realita yang ada menunjukkan, bahwa banyak daerah otonom yang kebijakan pembangunan ekonominya didasarkan pada keunggulan komparatif dengan dan keunggulan disetiap daerah, misalnya perekonomian daerah yang berbasis pada hasil tambang, hutan, pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Untuk lebih mengoptimalkan upaya pengembangan perekonomian daerah, diperlukan inovasi atau prakarsa serta strategi pengembangan ekonomi bagi masing-masing daerah.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Secara luas pariwisata juga dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan, pembangunan pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994).

Yoeti (2007) menambahkan alasan Pentingnya pengembangan pariwisata pada suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan

perekonomian daerah tersebut, dalam hal keuntungan dan manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat daerah setempat. Apabila usaha pariwisata dikembangkan dengan baik dengan sendirinya akan memberikan dampak positif bagi daerah berupa penerimaan pajak dan retribusi daerah, penyediaan kesempatan kerja dan memperkecil angka pengangguran, serta peningkatan bagi perekonomian setempat yang dapat menimbulkan permintaan baru terhadap hasil-hasil pertanian, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga, kerajinan dan pertenunan, akibat pengeluaran (uang yang dibelanjakan wisatawan) di Daerah Tujuan Wisata.

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Pasal 1 pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Peran pemerintah juga sangat penting dalam pengembangan pariwisata dimana Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur terkait kebutuhan pariwisata. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa pemerintah berperan sebagai legislator dan regulator dalam perencanaan pengembangan pariwisata. Tidak hanya itu pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju dalam perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan stakeholders yang lain dalam memainkan peran masing-masing.

Rumusan Masalah

Implikasi diberlakukannya sistem desentralisasi telah membuka peluang bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi cukup besar dalam pengembangan pariwisata karena memiliki alam yang indah. Dilihat dari data jumlah objek wisata yang ada pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu kabupaten yang memiliki jumlah potensi objek wisata yang cukup banyak dan cukup beragam yaitu berjumlah 135 objek wisata yang terdiri dari objek wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya.

Sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), potensi kepariwisataan di Kabupaten Tanah Datar telah memiliki daya tarik cukup kuat bagi kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara karena dilihat dari sisi produk wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang cukup beragam, selain potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah juga terdapat potensi atraksibudaya masyarakat yang berupa kesenian-kesenian rakyat, permainan rakyat, upacara adat, legenda/cerita rakyat yang dapat ditampilkan untuk memperkayapengalaman wisatawan yang datang ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini seharusnya mampu menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah daerah pada khususnya, untuk memperbaiki dan membawa sektor pariwisata daerah menjadi lebih baik.

Saat ini jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar masih mengalami naik turun. Menurunnya jumlah kunjungan tentunya disebabkan berbagai hal dan kendala yang mungkin dihadapi dalam pengembangan objek wisata yang ada, baik dalam pengelolaan maupun dalam pemanfaatannya.

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar, serta mengetahui kebijakan dan upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan pariwisata.

MATERI DAN METODA

Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (1998) model penelitian deskriptif ini digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar. Adapun metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survey pada beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian maka data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Semua data yang diperoleh dideskripsikan/digambarkan secara sistematis, dan faktual dengan menggunakan prinsip 5 W dan 1 H (*What, Why, Where, Who, When, Dan How*) yang berarti (apa, mengapa,

dimana, siapa, kapan dan bagaimana) sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses sosial, realitas sosial dan semua atribut dari fenomena tersebut yang kemudian dianalisa secara *interpretative* menggunakan teori-teori ataupun literatur-literatur yang sesuai kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar

Hasil penelitian lapangan tentang kondisi dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Produk /Atraksi wisata

Berdasarkan penelitian dan pengamatan lapangan diketahui bahwa atraksi/produk wisata yang ada pada objek wisata Tanjung Mutiara Dan Objek Wisata Panorama Tabek Patah adalah:

No	Syarat objek wisata menurut (Yoeti, 1997)	Kondisi pada objek wisata Tanjung Mutiara	Kondisi pada objek wisata Panorama Tabek Patah
1	<i>Something To See</i> (apa yg dapat dilihat)	pengunjung dapat melihat indahnya pemandangan alam Danau Singkarak yang terhampar luas dan udara yang sejuk disekitar lokasi wisata dan sudah dikembangkan dengan adanya taman serta tempat duduk santai bagi pengunjung.	pengunjung dapat menikmati indahnya pemandangan dari atas panorama dan udara yang sejuk karena dikelilingi pohon pinus yang menjulang tinggi. walau sudah ada taman untuk menambah indahnya lokasi wisata namun sayangnya masih kurang tertata dengan baik.
2	<i>Something To Do</i> yaitu apa yang dapat dilakukan dilokasi tujuan wisata	pengunjung dapat melakukan aktivitas wisata seperti berenang dan berperahu mengelilingi danau dengan perahu dan speed boot yang disewakan dilokasi wisata.	Aktifitas pengunjung hanya terbatas menikmati udara yang sejuk dan keindahan panorama saja, belum dikembangkan dgn atraksi wisata sehingga tidak ada aktivitas wisata yang dapat dilakukan.
3	<i>Something To Buy</i> yaitu apa yang bisa dibeli dan dijadikan sebagai oleh-oleh.	makanan khas yg dapat dijual sebagai oleh-oleh yaitu ikan Bilih goreng, yang dijual oleh masyarakat dilokasi wisata, dan dapat sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang datang	Tidak ada yang dijual dan menjadi kenangan dilokasi wisata.

(sumber: data primer)

Atraksi wisata merupakan bagian penting dalam pengembangan suatu objek wisata, atraksi juga merupakan produk wisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke lokasi objek wisata. Dalam pengembangan objek wisata tentunya produk atau atraksi wisata yang ditampilkan dapat menarik minat wisatawan untuk datang. Semakin unik dan beragam produk wisata yang ditampilkan akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan karena

atraksi wisata yang ada pada satu lokasi wisata merupakan daya tarik yang menjadi tujuan bagi wisatawan untuk mengunjungi lokasi wisata.

2. Aspek Transportasi

Berdasarkan pengamatan dan penelitian lapangan diketahui bahwa transportasi menuju lokasi wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar khususnya pada Objek Wisata Tanjung Mutiara dan objek Wisata Panorama Tabek Patah cukup lancar seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Aspek transportasi	Objek Wisata Tanjung Mutiara	Objek wisata panorama tabek patah
1	Transportasi/kendaraan menuju lokasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dari Padang dengan bus jurusan Padang-Malalo ➤ Dari Kota Batusangkar dengan angkutan umum dari terminal Dobok menuju Nagari Batu Taba, ➤ Dari Solok dengan angkutan umum yang melewati Nagari Batu Taba menuju Padang Panjang dan Bukittinggi. ➤ Menuju kelokasi wisata pengunjung naik ojek didepan gerbang utama wisata dengan biaya sewa Rp.3000,-perorang. ➤ Namun sayangnya belum ada kendaraan yang khusus yang menuju lokasi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bus angkutan umum dengan rute Batusangkar menuju Bukit Tinggi seperti Bus Yanti atau Sebaliknya. ➤ Kemudian berjalan lagi sejauh ± 1 Km menuju Objek Wisata Panorama Tabek Patah. Bisa menggunakan kendaraan pribadi ➤ belum ada kendaraan khusus yang menuju lokasi objek wisata
2	Jarak tempuh menuju lokasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jarak dari Kota Padang Panjang ± 18 Km, waktu tempuh ± 30 menit. ➤ Jarak dari Kota Batu Sangkar (Ibu Kota Kabupaten) ± 25 Km dengan waktu tempuh ± 40 menit ➤ Jarak dengan kota Solok ± 30 Km dengan waktu tempuh ± 1 jam. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berjarak ± 16 km dari pusat Kota Batusangkar dengan waktu tempuh ± 30 menit

		➤ Jarak objek Wisata Tanjung Mutiara di Nagari Batu Tabani dengan Ibu Kota Provinsi (Padang) ± 90 Km, dengan jarak tempuh ± 2 jam 30 menit	
3	Kondisi jalan lokasi wisata	➤ Kondisi jalan sudah baik dan lancar, namun belum ada angkutan khusus yg menuju objek wisata	➤ sudah baik dan lancar, namun blm ada angkutan khusus yg menuju objek wisata

(sumber : data primer)

Dilihat dari segi aspek transportasi kedua objek wisata memiliki potensi karena cukup didukung dengan letak dan sarana prasana transportasi yang cukup memadai, baik sarana jalan maupun sarana angkutan menuju lokasi wisata.

Menurut Yoeti (2007) Jalan merupakan prasarana terpenting bagi suatu objek wisata. Jalan yang layak dibutuhkan sekali dalam pengembangan objek wisata, karena jalan merupakan sarana penghubung yang dapat

melancarkan proses transportasi, dengan adanya proses transportasi yang lancar maka akan memudahkan dalam pengembangan kawasan wisata.

3. Aspek Sarana Prasarana Wisata/Fasilitas Layanan Wisata

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada Objek Wisata Tanjung Mutiara dan Objek Wisata Panorama Tabek Patah sarana prasarana dan fasilitas layanan wisata yang ada yaitu:

No	Sarana dan prasarana /fasilitas layanan wisata	Objek Wisata Tanjung Mutiara	Objek Wisata Panorama Tabek Patah
1	Sarana konsumsi (Restoran /rumah makan)	Dilokasi wisata terdapat 9 buah warung makanan sedangkan restoran berada diluar lokasi wisata namun jaraknya tidak terlalu jauh	Dilokasi wisata Terdapat 2 warung makanan dan tidak ditemukan adanya rumah makan
2	Sarana penginapan (hotel)	Terdapat sebuah hotel penginapan yaitu singkarak sumpur hotel	Tidak ada penginapan atau hotel disekitar lokasi wisata
3	Sarana komunikasi	Sarana komunikasi sudah memadai dan terjangkau	Sarana komunikasi sudah
4	Sarana energi (listrik)	Jaringan listrik telah memadai dan menjangkau lokasi wisata	Jaringan listrik telah memadai dan menjangkau lokasi wisata
5	Layanan air bersih	Layanan air bersih sudah memadai dan cukup lancar	Layanan air bersih sudah memadai dan cukup lancar
6	Sarana ibadah	Dilokasi wisata dan disekitar kawasan wisata sudah	Dilokasi wisata belum dilengkapi dengan sarana

		dilengkapi dengan sarana ibadah	ibadah
7	Fasilitas penunjang wisata lainnya	Dilokasi wisata sudah dilengkapi dengan sarana parkir, wc umum, tempat sampah, saung-saung tempat duduk dan arena bermain anak dengan kondisi sarana yang cukup baik	Fasilitas yang sudah ada dilokasi wisata yaitu tempat duduk, wc umum, tempat sampah dan tempat parkir namun kondisi sarana tersebut kurang terawatt

(sumber : data primer)

4. Aspek Informasi dan promosi

Dari penelitian dilapangan promosi dan informai mengenai objek wisata yang dilakukan oleh pengelola Wisata Tanjung Mutiara maupun wisata Panorama Tabek Patah bisa dikatakan tidak ada hal ini terlihat dengan tidak adanya ditemukan spanduk atau brosur-brosur, atau peta tentang objek wisata yang dikunjungi tidak ada. Berdasarkan wawancara dilapangan pengelola wisata menyatakan mereka tidak memiliki dana ataupun kemampuan yang baik dalam mempromosikan objek wisata tersebut. Promosi yang dilakukan selama ini hanyalah melalui biro perjalanan maupun warga yang peduli dan mengagumi keindahan objek wisata dan mempromosikannya melalui media internet. Promosi dan publikasi merupakan hal yang sangat vital dalam kepariwisataan. Seorang wisatawan tidak akan mengetahui bagaimanapun indahnya objek wisata kalau tidak ada suatu informasi yang diterima tentang daerah atau objek wisata tersebut (Kodhyat, 1980).

Kebijakan Dan Upaya yang dilakukan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tanah Datar

1. Kebijakan Pemerintah Terkait Atraksi /Daya Tarik Wisata

Untuk meningkatkan dan mengembangkan produk wisata yang ada, maka pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar melakukan kebijakan pengembangan destinasi wisata. Program pengembangan destinasi wisata ini berkaitan dengan pengembangan daya tarik objek wisata dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan pengembangan objek wisata yaitu berupa perbaikan dan penyediaan terhadap sarana prasarana penunjang wisata serta adanya survey dan investigasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan (daya tarik objek, sarana prasarana pendukung, aksesibilitas menuju objek wisata, aspek lingkungan dan masyarakat dll).

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga memberikan keringanan pajak daerah terkait dengan penyelenggaraan usaha sektor pariwisata seperti keringanan pajak hiburan (untuk *event-event* tarian tradisional yang diadakan di objek-objek wisata) hanya dikenakan pajak sebesar 10 %, jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan pajak hiburan secara umum yang berkisar sebesar 20%, sedangkan besaran pajak khusus untuk hiburan berupa pertunjukan busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke,

permainan ketangkasan dll besaran pajaknya jauh lebih besar yaitu mencapai 75% (Perda Nomor 6 Tahun 2011). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata yang ada melalui penyelenggaraan atraksi dan kegiatan-kegiatan atau *event-event* yang menjadi destinasi wisata di Kabupaten Tanah Datar. Namun sayangnya kebijakan pengembangan destinasi objek wisata ini belum memberikan arahan dan gambaran secara lebih detail tentang pengembangan atraksi dan daya tarik pada objek wisata yang ada secara khusus.

2. Kebijakan Pemerintah Terkait Sarana Prasarana Wisata

Kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait sarana prasarana penunjang wisata adalah berupa Kebijakan mempermudah perijinan (Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013) dan pajak (Perda No.6 Tahun 2011). Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah usaha akomodasi rumah makan dan restoran yang ada di Kabupaten Tanah Datar yaitu dari 40 usaha rumah makan pada tahun 2011 menjadi 54 usaha pada Tahun 2013, namun untuk usaha biro perjalanan di Kabupaten Tanah Datar jumlahnya masih sedikit begitu juga untuk usaha akomodasi penginapan jumlah belum representatif. Kemudahan perijinan usaha akomodasi pariwisata dilakukan karena sarana prasarana akomodasi merupakan salah satu aspek penting yang juga sangat diperlukan dalam mendukung pengembangan daya tarik wisata.

3. Kebijakan Pemerintah Terkait Promosi Wisata

Kebijakan pemerintah terkait promosi wisata yaitu peningkatan sarana dan prasarana promosi wisata daerah yakni berupa pembuatan bahan-bahan penunjang promosi wisata (seperti flamfet, brosur, dvd dan bahan-bahan promosi lainnya) serta pembuatan kalender event pariwisata dengan tujuan agar pariwisata Kabupaten Tanah Datar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar.

Selain melakukan pembuatan bahan promosi, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar juga melakukan promosi wisata bersama antar Kabupaten Dan Kota Se-Sumatera Barat sebagai salah satu agenda promosi disamping juga turut mendukung promosi wisata provinsi. Promosi dan publikasi merupakan hal yang sangat vital dalam kepariwisataan. Karena melalui berbagai kegiatan promosi dan publikasi wisatawan dapat mengetahui informasi yang tepat dan lengkap mengenai kelebihan dari objek yang menjadi tujuannya (Kodhyat, 1980).

4. Kebijakan Pemerintah Terkait SDM Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar melakukan pelatihan-pelatihan terkait pengembangan sektor pariwisata bagi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan tentang sapa pesona kepada masyarakat disekitar lokasi wisata, memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata, melaksanakan koordinasi

pembangunan kemitraan pariwisata serta kegiatan pengembangan SDM dan profesional bidang pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga melakukan program kemitraan melalui kegiatan memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini belum dapat terwujud hal ini terlihat belum adanya terbentuk persatuan hotel maupun persatuan biro perjalanan wisata di Kabupaten Tanah Datar sehingga keberadaan hotel dan biro perjalanan yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung terhadap pengembangan wisata di kabupaten ini. Dalam pengembangan pariwisata peran semua pihak sangat diperlukan hal ini dikarenakan sektor pariwisata merupakan sebuah industri yang pengembangannya menyangkut berbagai aspek yang saling terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar belum dilakukan secara optimal hal ini terlihat pada kondisi beberapa objek wisata yang ada. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata masih terfokus pada pelaksanaan *event* dan promosi budaya dan belum menyentuh pengembangan terhadap objek wisata secara lebih khusus sehingga dalam pelaksanaannya masih belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Datar.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran agar kebijakan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Datar dapat lebih dipertajam serta terus dilakukan evaluasi agar kebijakan yang diambil benar-benar bisa mendukung pembangunan sektor pariwisata secara umum dan objek wisata secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Biederman, Paul S., Jun Lai, Jukka M. Laitamaki, Hannah R. Messerli, Peter D. Nyheim, dan Stanley C. Plog, (2007): *Travel and Tourism: An Industry Primer*, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ.
- Cristanto, Joko. 2002. *Otonomi Daerah Dan Skenario Indonesia 2010 Dalam Konteks Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Kewilayahan*. Makalah Falsafah Sains Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Edgell Sr, David L., Allen, Maria D., Smith, G., Jason, R. Swanson, (2008): *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow*, Elsevier, Burlington.
- Hadinoto. 1997. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. PT.Gramedia. Jakarta.
- Hartanto. 1997. *Menjelang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Perspektif Perencanaan Kebijakan*. ITB. Bandung.
- Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning: Integrated and Sustainable Development*

- Approch.* Van Nostrand Reinhold. New York.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar pariwisata*. PT Grasindo. Jakarta.
- Karyono, Hari. 1997. *Kepariwisataaan*. PT. Gramedia Widi Sauna Indonesia. Jakarta.
- Kodhyat, H. (1980). *Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya di Indonesia*. Gramedia Rasindo.
- Kusmaryadi, Endar Sugiarto. 2000. *Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisataaan*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Alfabeta. Bandung.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Galia Indonesia. Jakarta.